

**REDEFINISI ADMINISTRASI
DALAM LINTASAN PEMIKIRAN FILSAFAT
(Suatu Kajian Konseptual Tentang Alternatif Pencegahan Korupsi dan Mal Praktek
Administrasi Serta Terapi Penyakit Birokrasi*)**

Oleh : Faried Ali)**

ABSTRAK

Kajian tentang redefinisi administrasi dalam lintasan pemikiran filsafat adalah suatu kajian konseptual berkenaan dengan rumusan administrasi yang secara derfinitif dijadikan acuan oleh para ahli dan mahasiswa yang meminati administrasi sebagai suatu disiplin ilmu serta digunakan oleh para praktisi dalam berbagai bidang kegiatan kerjasama. Kajian konseptual dilakukan oleh penulis untuk dapat dijadikan alternatif pencegahan korupsi dan malpraktek administrasi serta sebagai terapi penyakit birokrasi yang hingga kini semakin mewabah dan susah terkenalikan baik oleh kekuasaan maupun oleh kekuatan kaidah keberlakuan hukum.

Kajian dilakukan berdasarkan pemikiran filsafat, dimana rumusan administrasi yang telah menjadi acuan yaitu sebagai suatu kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasio guna pencapaian tujuan secara bersama dengan menempatkan aspek aksiologis yang menjadi sasaran yang diinginkan dalam lintasan pemikiran filsafat, mulai dari pemikiran filsafat rasional sebagai pemikiran dasar yang digunakan dalam merumuskan administrasi melintasi pemikiran filsafat existensialisme, fenomenologis, empirisme, pragmatisme hingga post positivisme.

Dengan menggunakan metode kontemplasi yang diikuti dengan analisa skeptis atas aplikasi konseptual pada fakta-fakta yang terjadi dalam realitas aplikasi rumusan administrasi, hasil kajian terhadap definisi administrasi sebagai kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasio dalam pencapaian tujuan secara bersama, produk pemikiran filsafat rasional ternyata yang melahirkan praktek-praktek yang rasional yang direkayasa sehingga yang rasio dapat saja direkayasa menjadi sesuatu yang tidak rasio, sebaliknya pun demikian, sesuatu yang tidak rasional dapat direkayasa menjadi rasional, dimana hal itu disebabkan oleh ulah manusia dalam kerjasama.

Hasil kajian demikian melahirkan berbagai perbuatan yang kurang bermoral yang berimplikasi pada perbuatan melawan hukum, dilakukan secara melembaga dan memungkinkan terjadinya kerjasama atas dasar kesepatan saling menguntungkan dan terformulasi dalam berbagai bentuk mafia. Realitas hasil kajian demikian mendorong pemikiran penulis untuk menawarkan solusi terhadap realitas aplikasi pemikiran filsafat rasional tentang administrasi dengan melakukan perumusan kembali (redefinisi) sesuai dengan pemikiran filsafat mutaakhir yang merumuskan administrasi bahwa keberadaan manusia secara factual sekaligus dalam esensi keberadaanya dalam kerjasama guna mencapai tujuan dan dalam esensi keberadaanya dalam kerjasama guna memberikan isyarat bahwa keberadaan manusia administrasi adalah keberadaan yang dikendalikan oleh 3(tiga) ranah dalam satu kesatuan kedirian manusia secara faktual, yaitu 1) dengan ranah jasmaniah, manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya; 2) dengan ranah rohaniahnya manusia berupaya menggunakan rasionya untuk menciptakan sesuatu, untuk merasakan kehendaknya serta untuk memenhui karsanya; 3) dan dengan ranah spritual,

*) *Suatu kajian konseptual yang diajukan untuk meredam korupsi*

***) *Prof. Dr. H. Faried Ali., SH.,MS, Guru besar pada Program Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin*

manusia dapat mengendalikan kedua ranah yang dimiliki kearah hal-hal yang bermoral. Dan ketika itu terjadi, maka rumusan administrasi harus mengalami perumusan kembali (redefinisi) sesuai dengan alam pikir post positivisme sehingga dengan demikian segala kerjasama yang dapat melahirkan KKN, mal praktek administrasi serta berbagai penyakit birokrasi akan terkendali.

Kata kunci: Redefinisi Administrasi

PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran manusia yang teraplikasi pada temuan dari berbagai disiplin ilmu dan teknologi dalam awal perjalanannya hingga munculnya pemikiran quantum, tidaklah signifikan dengan perkembangan moral manusia. Pemikiran dan dalam berbagai aplikasi telah melahirkan begitu banyak teori dan konsep serta begitu ragam metode yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia, langsung dan tidak langsung, namun kesemuanya itu belum dapat menghentikan keinginan manusia berbuat yang yang tidak bermoral. Ilmu dan teknologi pada hakekatnya digunakan untuk menguak kebenaran di dalam realitasnya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia seseorang, sekelompok dengan berbagai perilaku yang dapat memenuhi keinginan dengan mengabaikan kemanfaatan yang dibangun diatas landasan moral dan etika serta diimani oleh keyakinan yangt mendalam atas ajaran-ajaran keagamaan apalagi jika mendasarkan pada agama tauhid.

Pemikiran yang dibangun diatas landasan pemikiran rasional serta dengan nilai aksiologis yang ditujukan pada

pencapaian efektivitas, efesiensi, ekonomis yang hingga kini telah mengembangkan sayap axiologisnya pada nilai keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan berbagai nilai yang dituntut oleh paradigma pemikiran mutakhir, di dalam aplikasi konsep pada berbagai bidang kegiatan, telah melahirkan perbuatan-perbuatan yang secara signifikan dengan rasio namun tidak signifikan dengan perkembangan moral manusia.

Moral manusia yang teraktualisasi pada sikap dan perbuatan yang menampak pada perilaku yang bersusila ketika nilai-nilai yang menjadi anutan mengarahkan pada perbuatan yang baik, perbuatan yang dibenarkan oleh ajaran moral, ajaran etika, apalagi jika nilai itu dilihat dalam lokus keagamaan. Perbuatan yang bermoral adalah perbuatan yang menampak pada keprilakuan yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai etika dan apalagi pada nilai-nilai kegamaan.

Sangatlah disadari, posisi nilai dalam perbuatan manusia yang bermoral hanyalah sekedar panduan jiwa seseorang untuk bersikap dan bertingkah laku, kekuatan keberlakuannya hanya bersumber dari diri setiap orang, maksimal

hanya perasaan terbebani oleh pandangan masyarakat atas perbuatan yang tak bermoral dilakukan. Kalau hal itu berkenaan dengan nilai yang berasal dari ajaran keagamaan, perasaan takut salah hanyalah karena keyakinan atas adanya dosa yang akan dipikul dan dipikulkan oleh sesuatu yang dipandang prima kausa dalam kehidupan. Perbuatan yang tidak bermoral tidak diikuti dengan peletakan ancaman hukuman dari Negara sebagaimana ancaman hukuman atas perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu, keberlakuan ajaran moral, etika dan keagamaan hanya akan menjadi sesuatu yang diinginkan untuk diwujudkan tetapi bukan sesuatu yang harus diwujudkan dan apalagi dipaksakan untuk diwujudkan. Ia akan sebatas himbauan dan paling tinggi tingkatan keberlakuan hanya sebatas teguran sehingga memungkinkan akan terjadinya perbuatan yang berulang-ulang terkecuali ajaran moral ditingkatkan menjadi kaidah hukum atau dijadikan sebagai landasan dalam memperlakukan kaidah hukum.

Administrasi dalam substansinya adalah pengaturan dapat diaplikasikan dan teraplikasi dalam berbagai kegiatan, dari kegiatan kersjasama manusia mengangkat batu dan menyusunnya menjadi suatu bangunan yang bernilai, hingga pada kegiatan kerjasama yang

berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan atas dasar landasan rasionalitas yang dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan yang diinginkan secara bersama. Rasio manusia yang berkedudukan sangat sentral dalam pemikiran administrasi akan dapat memberi warna dan corak atas kegiatan dan hasil kerja administrasi dalam aplikasinya. Rasio manusia sebagai salah satu ranah yang dimiliki manusia dalam kediriannya dapat mengendalikan ranah lainnya seperti ranah karsa sehingga manusia akan dapat berkendak sesuai dengan yang dipikirkan oleh rasio.

Ketika rasio sebagai pengendali pemikiran mengarah pada kehendak perbuatan yang bermoral atau lebih konkrit pada perbuatan yang dibenarkan oleh kaidah hukum, maka pemikiran dan perbuatan manusia akan menyatu pada keprilakuan yang bermoral, perbuatan yang tidak melawan hukum, Demikian pula ketika pemikiran mengarah pada kehendak perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang melawan hukum. Namun ketika sebaliknya yang terjadi, ketika ranah kehendak dapat mengendalikan rasio pemikiran manusia maka perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang melawan hukum tidak dapat dihindari, apalagi nilai-nilai keagamaan tidak lagi menjadi ikatan yang kuat dalam

membentuk pribadi-pribadi yang berketauhidan.

Perbuatan melawan hukum sebagai produk dari kegiatan kerjasama manusia yang disebut dengan administrasi dalam lokus kegiatan pemerintahan seperti korupsi, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, pencucian uang yang diperoleh dari hasil penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan adalah perbuatan yang tidak saja dikendalikan oleh rasio para pelaku akan tetapi juga dikendalikan oleh kehendak manusia-manusia dalam proses kerjasama menjadi kehendak bersama. Perbuatan ini akan semakin sulit dicegah ketika manusia dalam kerjasama yang disebut administrasi, apalagi di dalam lokus pemerintahan, lokus yang didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh para pelaku kerja sama. Disinilah perbuatan mafia dalam berbagai aspek kegiatan sangat mungkin terjadi dan terbentuk, seperti mafia hukum, mafia kasus, mafia pajak, mafia anggaran, mafia pemilu dan dimungkinkan mafia-mafia sektor lainnya.

Perbuatan melawan hukum yang berlangsung dalam lokus pengaturan pemerintahan (administrasi pemerintahan dalam artian yang luas) ini akan menjadi langgeng dan lestari ketika berlangsung secara terorganisir dan diorganisir oleh aparat birokrasi dalam suatu kerjasama birokrasi teknis, birokrasi politik, birokrasi

penegak hukum. Hukum apapun, apakah hukum normative ataukah hukum substantive ataupun hukum progresif yang diperlakukan dan atau pun lembaga pemberantasan korupsi bagaimanapun yang dibentuk, namun rasio dan kehendak manusia sebagai peletak dasar sekaligus sebagai titik sentral dalam kegiatan administrasi yang diselenggarakan tidak dilakukan perumusan kembali secara konseptual, maka perbuatan korupsi akan muncul dalam berbagai bentuk yang secara pasti akan bermunculan dalam proses pemberantasan korupsi.

Sejumlah fakta menjadi acuan; sejak pemerintahan orde baru, gerakan anti korupsi telah dikumandangkan diikuti dengan pembentukan lembaga pemberantasan dengan dibentuknya OPSUS yang dikomandoi oleh Sudomo, korupsi muncul dalam baju kroni Suharto yang terpusat pada anak dan keluarga serta sahabat Suharto hingga kini telah bertahun dibentuk Komite Pemberantasan Korupsi tapi realitas muncul berbagai macam mafia. Fakta-fakta berkenaan dengan korupsi dan variasi penanganan begitu ragam fenomena yang dihasilkan yang menjadi wacana perdebatan public, belumlah dapat meredam terjadinya perbuatan itu dan malah yang terjadi adalah bentuk perbuatan dalam kuantitas yang tidak terkendali dan dalam kualitas yang sangat tinggi.

Perbuatan mafia korupsi pada hakekatnya merupakan perbuatan yang mengandung narkoba, mengandung heroin, mengandung sabu-sabu. Semakin dilakukan semakin diminati karena di dalamnya mengandung candu yang membawa manusia pada tingkat tingkat kenikmatan yang mendekati kematian. Seseorang yang terlibat dalam perbuatan itu akan menjadi sadar ketika ia sudah berhadapan dengan malakil maut, malaikat pencabut njawanya. Candu dalam pengertian kekuasaan, semakin seseorang berkuasa maka semakin ia akan menguasai. Itulah hakekat dari suatu kekuasaan.

Dalam konteks hukum, perbuatan mafia korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan banyak orang. Perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa melibatkan orang lain adalah bukan korupsi tetapi berkategori perbuatan pidana pencuri, penggelapan dan semacamnya. Perbuatan korupsi melibatkan banyak orang karena di dalamnya pasti ada kerjasama yang berproses secara administrasi namun dalam kerjasama ada yang berperan sebagai dader, mededader dan medepligtingen. Seseoran yang memberi peluang agar proses korupsi itu dapat berlangsung sangat dimungkinkan dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan, apalah membantu dengan

alat, informasi atau kesempatan, semuanya terkatagori sebagai mededader.

Disinilah letaknya kesulitan memberantas korupsi jika rasio dan kehendak manusia sebagai peletak dasar dan sebagai titik sentral dalam kegiatan kerjasama yang disebut dengan administrasi dalam berbagai lokus utamanya dalam lokus pemerintahan tidak dilakukan perumusan-perumsan kembali yang secara konseptual melalui redefinisi.

KONSEP “ADMINISTRASI” DALAM PEMIKIRAN FILSAFAT

Konsep “Administrasi” yang dalam awal kemunculannya lewat esay Wilson’s (1987)¹ diartikan dalam lokus kekuasaan sebagai pelaksana undang-undang (hukum) yang terperinci dan sistematis,. sedangkan Undang-undang (hukum) secara normatif bermakna pengaturan sehingga dengan demikian konsep “Administrasi” dalam awalnya bermakna pelaksanaan pengaturan.

Namun terminologi “Administrasi” dalam kajian filsafat rasional yang melakukan pengkajian tentang manusia dalam suatu kerjasama yang berlagsung berdasarkan pertimbangan rasio dalam rangka pencapaian tujuan secara bersama, kerjasama mana berlangsung

¹ Fredirick Wilson Taylor, *The of Scientific Management*, NY Harper and Bother

dalam keteraturan, pengaturan, atau dalam lingkup yang luas yaitu “administrasion (Inggris)” atau “Beheren atau bestuur (Belanda)” yang berarti “*Pemerintah, Pemerintah*”. Pemikiran demikian itulah di dalam perkembangan mutakhir menempatkan terminologi “Administrasi” dalam konsepsi sebagai kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Federickson, 1990)².

Keteraturan, pengaturan, pemerintahan, sebagai obyek formal filsafat administrasi akan nampak pada hubungan pengatur dengan pihak yang diatur baik itu dalam konteks internal yang beralngsung maupun secara external antara individu sebagai manusia subyek administrasi dengan individu dalam kehidupan kelompok kecil hingga pada kehidupan masyarakat, negara sekalipun sebagai obyek yang harus dilayani, diayomi dan diberdayakan oleh para subyek administrasi.

Dalam kerangka keteraturan kerjasama manusia itulah secara rasional tergabunglah berbagai konsep administrasi lewat hasil pemikiran rasional para ahli mulai dari kajian manajemen ilmiah oleh Taylor³ dengan berbagai konsep seperti “spesialisasi yang dalam

praktek pada akhirnya melahirkan “sabotase dan hasil yang rendah”; “Manajerialisme” yang melahirkan “Mismanajemen”, oleh Fayol⁴ dengan konsep “Pengaturan” yang melahirkan konsep “Ketidakadilan”; oleh Weber⁵ dengan konsepsinya tentang “Hirarki” yang melahirkan konsep “Kepemimpinan yang dunggu dalam praktek”; konsep “kecakapan yang sedang-sedang hingga yang paling terjelek yang dikenal dengan konsep “layanan terjadwal”.

Semua perlakuan konsep dalam aplikasinya yang negatif disebutkan adalah produk dari pemikiran filsafat rasional yang sangat mengabaikan faktor manusia yang ada di belakang kegiatan pengurusan dan pemerintahan. Pemikiran yang rasional dalam prakteknya sangat memungkinkan praktek-praktek yang tidak rasional tetapi irasionalkan sebagaimana terjadinya berbagai penyimpangan administrasi seperti seperti “Korupsi”, “Kolusi” dan “Nepotisme” melalui praktek-praktek administrasi yang dikonsepsikan sebagai “malpraktek administrasi” belum lagi sejumlah praktek birokrasi seperti adanya model utiliti maksimal birokrasi oleh Niskanen⁶ sebagaimana dipraktekkan di

² George N. Fredericson “*Administrasi Negara Baru*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1990)

³ Frederick Winslows Taylor, “*The of Scientific Management*”, NY.Harper and Brother Publisher, 1919

⁴ Henry Fayol, “*Industial and General Administrasion*” Dunod, 1925.

⁵ Gerald E.Caiden, “*Administrative Reform Come's of Age*” Walter de Gruyter, NY, 1991

⁶ Gerald E. Caiden, *op. cit.*

Indonesia yang melahirkan praktek saling menguntungkan dalam kehidupan brokrasi Indonesia, apalagi birokrasi yang dihindangi oleh 170 jenis perilaku yang sakit mulai dari penyakit yang ringan-ringan seperti “penyalahgunaan wewenang” hingga yang paling keras yang disebut dengan “pembunuhan kompetensi” dimana “korupsi” sebagai penyakit birokrasi yang mudah mewabah dan sangat mematikan.

“Administrasi” dirumuskan sebagai kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasionalitas untuk mencapai tujuan bersama, dalam pemikiran filsafat eksistensialisme adalah sesuatu yang fiktif dimana manusia dipandang dan dipikirkan secara rasional dapat bekerjasama karena hakekat kemanusiannya (cipta, karsa, dan rasa)⁷. Padahal bagi manusia selaku individu secara aktual, selalu “berada” secara nyata. Dari sanalah ia dapat menciptakan kerjasama dan bukan sesuatu yang dapat bekerja sama. Oleh karena itu, efisiensi, rasionalitas, ekonomi dan efektivitas dalam aliran rasionalisme tidak selalu diciptakan oleh kerja sama manusia karena kebutuhan kemanusiannya tetapi secara aktual dapat diciptakan oleh individu melalui kerjasama yang dikehendaki.

Efisiensi secara rasional adalah perbandingan terbaik antara luaran dengan masukan adalah sesuatu yang diciptakan jika para individu secara aktual menghendaki. Disinilah persoalan korupsi dan berbagai penyakit birokrasi lainnya dapat tumbuh dalam administrasi yang rasional. Dari sini pulalah konsep pemberantasan korupsi dan berbagai penyakit birokrasi lainnya tidak bisa dilakukan hanya dengan pertimbangan rasionalitas tetapi harus dilihat dari realitas hidup para individu dalam kehidupan bersama. Manusia tidak lagi dapat dilihat sebagai alat untuk menciptakan efisiensi tetapi pemikiran efisiensi itu yang harus mengaktualisasikan dalam kehidupan individu. Oleh karena itu, administrasi secara konseptual adalah tidak dapat berada apalagi kerjasama adalah sesuatu yang fiktif, dimana keberadaannya tergantung pada manusia berinteraksi secara aktual. Aktualisasi interaksi dalam kerjasama, secara aktual hanya berlangsung dalam hubungan-hubungan kerja yang secara aktual akan menampak pada kehidupan berorganisasi. Pada organisasilah, secara aktual individu berinteraksi satu dengan lain dalam hubungan kerja dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

“Administrasi” secara eksistensialisme adalah pengaturan dan keteraturan yang dilakukan oleh individu-

⁷ Faried Ali, “*Filsafat Administrasi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)

individu, yang secara aktual akan bekerjasama sesuai keberadaannya masing-masing individu, tentunya tidak terlupe dari konflik-konflik yang selalu saja dan pasti akan terjadi antara individu-individu dalam aktualisasi dirinya baik itu konflik yang ada dalam dirinya maupun konflik yang akan terbawa keluar dari dirinya. Yang ada dalam dirinya adalah sesuatu yang aktual ketika individu disertai melaksanakan tugas sedangkan tugas yang dilakukannya secara aktual bertentangan dengan tuntutan etika yang secara aktual pula menuntut individu untuk berbuat dan berpikir. Sedangkan yang keluar dari dirinya adalah kehendak yang secara aktual untuk berbuat sesuatu yang orang lain tidak dapat menerimanya.

Namun kemungkinan penerimaan untuk bekerjasama secara aktual ada dalam kehidupan individu itu sendiri. Oleh karena itu "administrasi" secara konseptual tidak selalu menghasilkan apa yang diinginkan oleh konsep itu sendiri, tetapi ia akan tergantung pada aktualisasi individu dalam kerangka kerjasama yang dilakukan.

Korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang dicegah melalui sistem administrasi yang mapan tidak harus terjadi, tetapi korupsi dan berbagai penyakit birokrasi melalui administrasi dapat saja terjadi jika aktualisasi individu dalam kerjasama menghendaknya.

Bukankah pembenaran yang kita nyatakan bahwa administrasi teraktualisasi melalui organisasi dan manajemen, akan diwarnai oleh keprilakuan individu dalam aktualisasi dirinya pada kehidupan organisasi dan pada hasil karyanya pada apa yang disebut dengan manajemen.

Eksistensi menekankan keunikan dan kedudukan pengalaman kesadaran yang dalam dan langsung. Pendorong yang utama adalah "untuk hidup dan untuk diakui sebagai individual". Jika seseorang manusia diakui seperti itu maka ia akan memperoleh arti dan makna dalam kehidupan. Tempat bertanya yang paling penting bagi seseorang manusia adalah kesadarannya yang langsung dan kesadaran tersebut tidak dapat dimuat dalam sistem atau dalam abstraksi. Pemikiran abstrak cenderung untuk tidak melihat seseorang tertentu dan menjauhkan seseorang dari rasa manusia yang konkrit dan rasa berada dalam situasi manusia.

Realitas atau wujud adalah eksistensi yang terdapat dalam "saya" dan bukan pada "dia". Oleh sebab itu pusat pemikiran arti adalah dalam eksistensi seseorang pemikir. Kierkegaard⁸ menegaskan bahwa manusia meng-anggap bahwa pandangan hidupnya ditetapkan oleh akalnyanya adalah orang yang meletihkan

⁸ Kierkegaard dalam Faried Ali, "Filsafat Administrasi" (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003)

dan tidak berpandangan jauh. Ia gagal untuk memahami fakta yang elementer bahwa ia bukannya pemikir yang murni, akan tetapi ia adalah seorang yang ada.

Eksistensialisme membedakan antara eksistensi dan esensi (hakekat). Eksistensi berarti keadaan yang aktual yang terjadi dalam ruang dan waktu; ia menunjukkan kepada "suatu benda yang ada disini sekarang". Eksistensi berarti bahwa jiwa atau manusia diakui adanya atau hidupnya. Bagi kelompok eksistensialis kata kerja "untuk berada" mempunyai isi yang lebih positif dan lebih kaya dari kata kerja "untuk hidup". Kadang-kadang orang mengatakan tentang orang yang hidup kosong dan tanpa arti bahwa "ia tidak hidup, ia hanya ada". Kelompok eksistensialis mengubah kata ini dan mengatakan "orang itu tidak ada, ia hanya hidup". Oleh karena itu bagi eksistensialis adalah kehidupan yang penuh tangkas, sadar, tanggung jawab, dan berkembang.

Sedangkan esensi berbeda arti dari eksistensi. Esensi adalah sesuatu yang membedakan antara satu benda dan corak-corak benda lainnya. Esensi adalah yang menjadikan benda itu seperti apa adanya. Esensi adalah umum untuk beberapa individu dan kita dapat berbicara tentang esensi secara berarti, walaupun tidak ada contoh benda itu pada suatu waktu. Kita membedakan antara "benda

itu apa" dan "itukah benda itu". Jawaban pertanyaan pertama adalah jawaban esensi, sedangkan jawaban yang kedua adalah eksistensi.

"Administrasi" dalam esensinya adalah keteraturan. Ketika pemikir mendefinisikan "Administrasi" sebagai kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama, diharapkan dapat menciptakan keteraturan. Bagaimana keteraturan itu berlangsung akan diwarnai oleh nilai yang menjadi energi dan motivasi perkembangan. Esensi demikian itu telah dipikirkan adanya walaupun dalam konsepsi, tetapi bagaimana adanya itu secara aktual, berada, adalah tergantung pada aktualisasi individu dalam kerjasama yang berlangsung.

Oleh karena itu, keteraturan sebagai esensi dari administrasi akan dapat diwujudkan jika individu dalam kesadarannya yang mendalam "berada" dalam kerjasama yang dilakukan. Aktualisasi individu yang bereksist itulah yang akan menentukan dapat diwujudkan keteraturan. Disnilah individu dalam kerjasama secara aktual akan menampakkan "akunya," "saya"nya dan bukan sebagai "dianya" sebagai manusia yang memiliki sifat-sifat kemanusiannya. "akunya" yang mengaktual itu lahir dari kesadaran yang mendalam dan

berlangsung secara langsung dalam diri terhadap “akunya”, dan hal ini adalah harus diakui dalam pengembangan administrasi

Administrasi bukanlah sesuatu konsep yang diinginkan tetapi sesuatu yang ada dalam kenyataan sesungguhnya. Terjadinya hal yang menyimpang secara administratif tidak dapat dikatakan karena salah kelola tetapi harus dicari bagaimana aktualisasi individu bersentuhan erat dengan kesadaran yang tidak dapat dilihat sebagai suatu sistem, sehingga sistem administrasi apapun yang diciptakan untuk menciptakan keteraturan tidak akan dapat menjawab kesalahan dalam pengaturan.

“Administrasi” sebagai kerjasama manusia adalah sesuatu gejala sosial, sesuatu yang fenomenologis, yang dalam pemikiran filsafat merupakan bagian pemikiran eksistensialisme, namun ia mempertimbangkan adanya realitas esensi manusia.

“Administrasi” yang esensinya adalah keteraturan hanya dapat diciptakan oleh manusia dalam harmonisasi fungsinya pada setiap individu sehingga apa yang diharapkan oleh keteraturan akan menampakkan keteraturan yang akan diwarnai oleh watak manusia pada saat manusia memperlihatkan harmonisasi fungsi dalam kerjasama dan sebaliknya

maka pada saat itulah fenomena atas realita akan terjadi.

Fenomenologi sebagai filsafat modern melihat realitas yang menggejala yaitu terjadinya disfungsi dari watak manusia harus pula dipahami dari eksistensi, harus dilihat dari “kau”nya individu, yang secara otonom bekerja sesuai kehendak diri setiap individu. Jadi bukan persoalan eksistensi dulu baru esensi tetapi kita harus memahami lebih dalam terhadap setiap yang menampak atau gejala dalam realitas. Kita harus memahami secara mendalam terjadinya penyimpangan dari keteraturan, apakah gejala-gejala yang nampak adalah suatu realitas sesungguhnya ataukah bagaimana wujud sesungguhnya dari gejala itu.

Penglihatan yang dilakukan adalah indera yang merupakan unsur esensi dari setiap manusia sedangkan penampakan yang tersajikan adalah realitas. Disinilah kita harus memulai berpikir bahwa persoalan eksistensi mendahului esensi tidak lagi menjadi pemikiran fenomenologis (tercapai esensi dari eksistensi). Unsur lain dari esensi manusia adalah rasa dan akal yang datangnya dari dalam diri manusia adalah kesemuanya merupakan ekspresi dari “Aku”nya yang lebih tinggi. Dengan demikian esensi dari eksistensi adalah “Aku” yang dibentuk oleh watak manusia yang terdiri dari harmonisasi

ketiga fungsi dalam diri individu. Inilah yang akan selalu menampak dalam setiap tingkah laku dan perbuatan, apakah penampakan itu dalam harmonisasi fungsi akan bergantung pada "Aku"nya yang menampak sebagai realitas bekerjanya prinsip otonomi yang ada pada diri setiap individu. Oleh karena itu "Administrasi", dalam esensinya akan tergantung dan akan diwarnai oleh beradanya individu, "aku" nya individu dalam kerjasama.

Pemikiran filsafat eksistensialisme termasuk didalamnya fenomenologis adalah bersumber dan bertolak dari pemikiran filsafat rasional sehingga hal yang tidak rasional dapat dirasionalkan. Namun, pemikiran berkembang terus sampai dengan munculnya pemikiran yang mengancam keberadaan sesuatu yang berbeda termasuk gejala yang menampak. Pemikiran itu datang dari cara pemikir filsafat empirisme, pemikiran tentang keberadaan sesuatu yang sesungguhnya terjadi, mulai dari mereka yang digolongkan sebagai traditional empirism yang dikembangkan antara lain oleh Locke⁹ dan Hume¹⁰ melintasi pemikiran filsafat dari mereka yang digolongkan sebagai pemikir positivisme yang dikembangkan antara lain oleh

Comte¹¹ hingga pemikiran filsafat logikal positivisme antara lain oleh March¹² dan Schilck¹³.

Pemikiran empirisme menunjukkan kecenderungan anti metafisik, anti spekulatif, dan malah mereka realitis dan meterialistik, kritis dan skeptis dan telah membantu pengembangan instrumen metodologi yang dikenal dengan logikal simbol, sebagaimana simbol Y bagi variable dependen dan simbol X bagi variabel independen.

Simon¹⁴, pemikir tentang administrasi yang pertama-tama mendasarkan pemikirannya pada filsafat positivisme mendasarkan pada asumsi yang dibagunnya atas dasar fakta dan bukannya sesuatu nilai yang selalu dijadikan dasar pemikiran kaum rasionalis. Fakta yang ia lihat sebagai suatu realita bukanlah fakta yang disusun atas dasar konsep sebagaimana mengkonsepsikan sebuah pensil sebagai sesuatu yang nyata kejadiannya. Oleh sebab itu pemikiran positivisme Simon dibangun dengan asumsi: bahwa proses pengambilan keputusan sangat menentukan untuk memahami gejala-gejala organisasional terjadi, berlangsung dalam hubungan

⁹John Locke dalam Harold H.Titus, et el, "Living Issues in Philosophy", (USA: Wadswott Publishing Company, 1979)

¹⁰David Hume dalam Harold H.Titus, et el, *ib id*

¹¹Auguste Comte dalam Faried Ali, "Filsafat Administrasi" (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003)

¹²Ersn March dalam Harold H.Titus, et el, *Living Issues in Philosophy*, (USA: Wadswort Publishing Company, 1979)

¹³Moritz Schilck dalam Harold H.Titus, et el, *ib id*

¹⁴Herbert A.Simon, "Administrative Behavior", Terjemahan St, Dianjung (Jakarta: Bina Aksara, 1982)

organisasi, hubungan kerjasama manusia secara faktual ia berada dalam ekisistesinya sebagai individu atau esensi keberadannya sebagai manusia dan secara logis ia terikat oleh hubungan hirarki yang dikehendaki oleh organisasi itu sendiri.

Simon¹⁵ dalam pengalaman empirismenya menyatakan bahwa diperlukan dua perubahan penting untuk merubah manusia ekonomi untuk menjadi manusia administrasi. Manusia ekonomi berusaha mencapai maksimum, memilih yang terbaik dari semua yang dapat diperolehnya, maka manusia administrasi mengutamakan kepuasan. Ia mencari serangkaian tindakan yang memuaskan atau "cukup baik". Manusia ekonomi berurusan dengan "dunia yang nyata dengan segala keruwetannya; manusia administrasi mengakui bahwa dunia yang dilihatnya dalam suatu model yang disederhanakan secara drastis dari kekacauan-kekacauan yang tumbuh subur yang menjadikan dunia yang nyata ini. Memaknai pemikiran Simon bahwa manusia dalam kerja sama yang dibentuk secara rasional guna pencapaian tujuan bersama melakukan kegiatan-kegiatan hanya sampai pada tingkat pemenuhan kebutuhan. Sepanjang kebutuhan terpenuhi makna kerjasama akan

berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Selain itu yang diharapkan oleh manusia dalam kerjasama yang disebut administrasi adalah keteraturan dunia dan dipandangny kacau, keteraturan mana yang menyangkut kausalitas fakta-fakta atas dunia nyata yang disederhakan.

Di Indonesia salah seorang pemikir postivisme, Siagian¹⁶ dalam hasil pengamatannya mendalam, merumuskan administrasi yang bertitik tolak dari manusia dan berorientasi kepada manusia. Hal ini dimaksudkan demi kepentingan manusia, dan akan diakhiri pula oleh manusia adalah sama dengan makna Filsafat Administrasi¹⁷ bahwa disamping yang utama memandang manusia dalam kerjasama yang disebut administrasi sebagai manusia dalam aktualisasi sesungguhnya tetapi juga memandang manusia dalam esensi keberadannya selaku individu.

Pemikiran positivisme Siagian tampak pada definisi-definisi atas beberapa konsep yang dikemukannya sebagaimana konsepsi administrasi yang di definisikan sebagai "keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah

¹⁵ *Ib id*

¹⁶Sondang P.Siagian, "Filsafat Administrasi" (Jakarta: Gunung Agung, 1977)

¹⁷Faried Ali, *Loc cit.* individu.

ditentukan sebelumnya". Jikalau pemikiran kita sependapat dengan Siagian bahwa "Administasi" bekerja atas dasar rasionalitas maka dapatlah dilakukan koreksi bahwa hal yang rasionalitas dapat melahirkan sesuatu yang tidak rasional karena ulah manusia dalam kerja sama. Oleh karena itu diperlukan perumusan kembali atas definisi administrasi yang selama ini dijadikan acuan di dalam berbagai kerjasama yang dibentuk dan yang terbentuk dalam berbagai bidang kegiatan utamanya dalam bidang kegiatan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, jikalau manusia administrasi dalam tingkah lakunya didominasi oleh ranah jasmaniahnya maka kecenderungan tingkah lakunya menampilkan tingkah laku kebinatangan sehingga persoalan baik dan buruk susah dibedakan, perbuatan KKN dan malpraktek administrasi dipandang sebagian hal yang biasa terjadi, penyakit birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang biasa dialami.

Sebaliknya, jikalau ranah rohaniah yang mendominasi dalam keprilaku manusia administrasi, maka akan nampak sifat keilahian manusia yang memungkinkan sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional, sehingga oleh karena itu diperlukan pengendalian oleh ranah spritual agar manusia administrasi dapat membedakan mana yang baik dan

mana yang buruk serta sesuatu yang tidak rasional, tidak dapat direkayasa menjadi sesuatu yang rasional, yang semuanya itu hanya dapat diarahkan oleh nilai-nilai spritual yang bersumber dari ajaran keagamaan.

Esensi keberadaan manusia administrasi demikian itu dapat diaplikasikan pada pemikiran filsafat selanjutnya seperti filsafat pragmatisme, filsafat yang berorientasi pada nilai guna seperti aplikasi teknologi dalam administrasi. Dengan esensi keberadaan manusia administrasi, maka secara pragmatis rumusan administrasipun dapat dirumuskan sebagai "kerjasama manusia dalam berbagai peralatan yang digunakan yang dapat memberikan kefaedahan dan kemasyalahatannya sebagai individu dalam esensi keberadaannya pada kehidupan bersama guna mencapai tujuan yang ditetapkannya secara bersama". Demikian pula pada perkembangan filsafat yang mutakhir, filsafat post-positivisme yang menempatkan rumusan administrasi pada sejumlah indikator seperti administrasi yang anti bentuk, berorientasi pada pola, antisintesis, indeterminisme dan sejumlah indikator lainnya.

Perubahan definisi "administrasi" dari pemikiran filsafat rasional menjadi

definisi dalam pemikiran filsafat positivisme, jika diaplikasikan maka akan dapat meredam korupsi khususnya di Indonesia, yang berdasarkan hasil kajian *Political and Economic Risk Consultancy* tahun 1997 Indonesia berada pada peringkat paling bawah atau negara terkorup di Asia mengalahkan India, Cina, Vietnam, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Taiwan, Malaysia, Jepang, Hongkong dan Singapura, yang menurut hasil studi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan¹⁸, perbuatan itu teraktualisasi dalam bentuk (1) pemerasan pajak, (2) pembayaran fiktif, (3) manipulasi perjalanan dinas, (4) pelelangan, (5) manipulasi tanah, (6) manipulasi kredit untuk koperasi, (7) harga kontrak terlalu tinggi, (8) kelebihan pembayaran, (9) ketekoran kas, (10) penggunaan dana tidak sesuai ketentuan, (11) uang komisi, (12) penggelapan uang negara, (13) pemalsuan dokumen, (14) pungutan dan malpraktek administrasi dengan berbagai realitas penyakit birokrasi, yang hingga kini malah mewujudkan dalam perbuatan mafia (kerjasama ikut serta secara bersama) walaupun dalam proses yang memakan waktu relatif lama, karena pengaplikasian

rumusan adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang mau tidak mau harus melintasi waktu yang relatif lama, apalagi penciptaan kesadaran manusia administrasi yang memahami esensi keberadaanya dalam kerjasama adalah proses penyadaran yang harus sinergi dengan proses pengagamaan perilaku, dan hal itu hanya dapat dilakukan lewat proses kepengajaran yang menyerap waktu yang relatif lama.

Namun, dapat saja dilakukan dalam waktu yang relatif singkat jika para administrator menghendaknya dengan mengatualisasikan esensi keberadaan manusia administrasi dalam keprilakuan pada pelaksanaan tugas-tugas kesehariannya dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan yang disediakan secara formal dan merupakan bagian integral dari penggambaran tugas yang diemban seperti diskusi sesaat setelah melaksanakan ibadah sesuai ajarannya.

Dengan kegiatan formal inilah maka spritual birokrasi akan selalu terisi dengan nilai-nilai keagamaan dan dari sanalah akan terwujud hati nurani yang bersih, hati nurani yang memancarkan nilai-nilai yang baik dan dari sana pula akan keluar suara hati nurani yang

¹⁸Hamid Basyaib dkk (ed), "Mencuri Uang Rakyat" 16 Sajian Korupsi di Indonesia, I

akan selalu melarang untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan nilai dan aturan.

Dengan demikian, perumusan kembali "administrasi" yang sesuai esensi keberadaan manusia administrasi akan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pemberantasan korupsi dan malapraktek administrasi serta dapat mengobati berbagai penyakit birokrasi.

PENUTUP DAN RANGKUMAN

Hasil kajian atas redefinisi administrasi melalui lintasan pemikiran filsafat sebagai alternatif pencegahan korupsi, praktek maladministrasi dan penyakit birokrasi yang semakin mewabah khususnya di Indonesia, memberikan simpulan-simpulan sebagai rangkuman dari hasil kajian konseptual sebagai berikut :

1. Konsep dasar yang kami sebutkan sebagai konsep awal dari terminologi "Administrasi" adalah hasil dari pemikiran filsafat rasional, yang menegaskan dan malah telah menjadi acuan berpikir bagi para administrator adalah suatu kerjasama manusia yang didasarkan pada pertimbangan rasional didalam rangka pencapaian tujuan secara bersama. Adanya pertimbangan rasional dalam kerjasama berdasarkan kajian

konseptual didalam aplikasi pada berbagai bidang kegiatan melalui pengaturan sebagai subsatnsi yang harus dilakukan, pada kenyataan hanya dapat melahirkan sesuatu yang tidak rasional sebab ulah dari manusia yang terlibat dalam kerjasama. Sesuatu yang rasional sebagaimana efektivitas, efisiensi dan ekonomi sebagai nilai yang diinginkan, dapat saja menjadi irasional sepanjang nilai itu terpenuhi, demikian pula sebaliknya bahwa sesuatu yang tidak rasional karena ulah manusia akan menjadi rasional dan dirasionalkan. Dari sinilah akar kehidupan perbuatan menyimpang, sehingga korupsi, mal administrasi dan penyakit birokrasi tumbuh subur.

2. Pemikiran filsafat eksistensialisme termasuk didalamnya pemikiran fenomenologis sebagai bagian yang utuh dengan pemikiran rasional, mengaplikasi konsep administrasi dengan pemikiran eksistensi dan esensi manusia serta berbagai gejala yang dinampakkan, namun perbuatan korupsi, maladministrasi dan penyakit birokrasi dalam proses kegiatan administrasi masih dimungkinkan untuk tumbuh dengan subur.
3. Pemikiran filsafat empirisme dilanjutkan dengan filsafat positivisme, yang lebih mendasarkan

bukan pada faktor nilai akan tetapi pada fakta yang terjadi dan malah secara bersama-sama fakta dan nilai dijadikan sebagai dasar pertimbangan, namun pada kenyataannya, korupsi, maladministrasi dan penyakit birokrasi belum dapat terbendung, malah muncul dalam bentuk yang sangat sulit terdeteksi secara simultan atas semua pelaku, sebagaimana Korupsi melalui mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus, mafia kredit melalui kasus Bank Century, mafia proyek yang dilakukan oleh M.Nazaruddin, mafia pemilu yang dilakukan oleh petugas Komite Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi, dan begitu banyak mafia dalam bentuk dan lapangan kegiatan lainnya.

4. Pemikiran mutakhir pun sebagaimana pemikiran filsafat quantum, juga sulit mengaplikasikan administrasi tanpa bentuk guna mencegah korupsi, maladministrasi dan penyakit birokrasi.
5. Rangkaian keberadaan manusia secara faktual sekaligus dalam esensi keberadaannya dalam kerjasama guna mencapai tujuan dan dalam esensi keberadaannya dalam kerjasama guna memberikan isyarat bahwa keberadaan manusia administrasi adalah keberadaan yang dikendalikan oleh 3 (tiga) ranah dalam

satu kesatuan kedirian manusia secara faktual. yaitu 1) dengan ranah jasmaniah, manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya; 2) dengan ranah rohaniahnya manusia berupaya menggunakan rasionya untuk menciptakan sesuatu, untuk merasakan kehendaknya serta untuk memenuhi karsanya; 3) dan dengan ranah spritual, manusia dapat mengendalikan kedua ranah yang dimiliki kearah hal-hal yang bermoral.

6. Manusia administrasi dalam tingkah lakunya didominasi oleh ranah jasmaniahnya maka kecenderungan tingkah lakunya menampilkan tingkah laku kebinatangan sehingga persoalan baik dan buruk susah dibedakan, perbuatan KKN dan malpraktek administrasi dipandang sebagai hal yang biasa terjadi, penyakit birokrasi dianggap sebagai sesuatu yang biasa dialami. Sebaliknya, jikalau ranah rohaniah yang mendominasi dalam keprilaku manusia administrasi, maka akan nampak sifat keilahian manusia yang memungkinkan sesuatu yang tidak rasional menjadi rasional, sehingga oleh karena itu diperlukan pengendalian oleh ranah spritual agar manusia administrasi dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta sesuatu yang

tidak rasional, tidak dapat direkayasa menjadi sesuatu yang rasional, yang semuanya itu hanya dapat diarahkan oleh nilai-nilai spritual yang bersumber dari ajaran keagamaan.

7. Redefinisi administrasi yang ditawarkan dapat diaplikasikan pada administrasi yang dikembangkan dengan pemikiran filsafat pragmatisme, pemikiran yang mempertimbangkan adanya kefaedahan yang dicapai seperti kefaedahan dalam penegakan keadilan, kebersamaan, apalagi di dalam aplikasi *Good Governance* dan alam berlangsungnya semangat demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.
8. Perubahan definisi "administrasi" dari pemikiran filsafat rasional menjadi definisi dalam pemikiran filsafat positivisme, jika diaplikasikan maka akan dapat meredam korupsi, mal administrasi dan penyakit birokrasi khususnya di Indonesia, karena pengaplikasian rumusan adalah merupakan suatu proses pembelajaran yang mau tidak mau harus melintasi waktu yang relatif lama, apalagi penciptaan kesadaran manusia administrasi yang memahami esensi keberadaanya dalam kerjasama adalah proses

penyadaran yang harus sinergi dengan proses pengagamaan perilaku, dan hal itu hanya dapat dilakukan lewat proses kepengajaran yang menyerap waktu yang relatif lama.

9. Proses pengagamaan perilaku dapat saja dilakukan dalam waktu yang relatif singkat jika para administrator menghendaknya dengan mengatualisasikan esensi keberadaan manusia administrasi dalam keprilakuan pada pelaksanaan tugas-tugas kesehariannya dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan yang disediakan secara formal dan merupakan bagian integral dari penggambaran tugas yang diemban seperti diskusi sesaat setelah melaksanakan ibadah sesuai ajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried., 2003, *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Basyaib, Hamid, dkk., *Mencuri Uang Rakyat 16 Sajian Korupsi di Indonesia*, I
- Fayol, Henry., 1925. *Industrial and General Administrasion*. Dunod, Terjemahan
- Fredericson, George N., 1990, *Administrasi Negara Baru*. Jakarta. PT RajaGrafindo,
- Gerald E. Caiden, Gerald E., 1991., *Administrative Reform Comes of Age*. Walter de Gruyter. N.
- Simon, Herbert A., 1982. *Administrative Behavior*. Terjemahan St. Dianjung (Jakarta Bina Aksara, Terjemahan Dianjung)
- Sondang P. Siagian, Sondang P., 1977, *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- Taylor, Fredrick Wilson., 1919, *The Philosophy of Scientific Management*. N.Y. Harper and Publisher.
- Titus, Harold H et al. 1979, *Living Issues in Philosophy*. USA, Wadsmott Publishing Co.